Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
Dan Peternakan Provinsi Jambi

LAPORAN KINERJA

TAHUN
2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2022 ini dapat tersusun dengan Visi "*Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan serta Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) berkelanjutan*".

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 berdasarkan Renstra DTPHP tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Kami menyadari, sangat dimungkinkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tanaman , Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis ke depan.

Besar harapan kami program dan kegiatan yang tersusun Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2022, dapat terlaksana untuk mewujudkan Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah danProfesional).
Terima Kasih

Jambi, Januari 2023

Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan Provinsi Jambi

Ir. Akhmad Maushul
Pembina Utama Madya
NIP. 19651211 199009 1001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Daftar Lampiran iv

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.3 Struktur Organisasi 3
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 6
1.5 Sumber daya Manusia DTPHP 10
1.6 Dukungan Anggaran 12
1.7 Sistematika Penyajian 13

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Visi dan Misi 15
2.2 Tujuan Strategis dan Sasaran 15
2.3 Perjanjian Kinerja 21

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 24
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022 50

BAB 4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan 52
4.2 Saran-Saran 54

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah PNS pada DTPHP Provinsi Jambi 10
Tabel 2. Jumlah Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsionla Umum pada DTPHP Provinsi Jambi 11
Tabel 3. Dukungan Anggaran DTPHP Provinsi Jambi 2022 12
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 DTPHP Provinsi Jambi Sumber Dana APBN 21
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 DTPHP Provinsi Jambi Sumber Dana APBD 22
Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2022 25
Tabel 7. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2022 26
Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020 29
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah 30
Tabel 10. Realisasi Anggaran APBN Dinas TPHP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 49
Tabel 11. Realisasi Anggaran APBD Dinas TPHP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi 5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian mengacu pada pola pertanian untuk pembangunan (*AgricultureforDevelopment*) yang menempatkan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan.Pola tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan pertanian Provinsi Jambi merupakan kunci utama keberhasilan dalam "**Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat".**

Perencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dipantau realisasi pelaksanaan setiap tahunnya dengan penyusunan Laporan Kinerja untuk mengetahui pencapaian target sasaran sehingga diketahui persentase pencapaian dan persentase kekurangan yang harus dipenuhi sebelum masa dokumen tersebut habis.

Sebagai bentuk perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022, diperlukan laporan tertulis yang harus dipublikasikan ke masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun untuk mengetahui capaian yang sudah dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada Tahun 2022.

1.2.Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2021–2026 khususnya pada Tahun 2022. Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini selain memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Untuk menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran Tahun 2022.Selain itu bertujuan pula untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Tujuan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja tahun 2022, dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Langkah selanjutnya adalah membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun 2021. Melalui perhitungan pembandingan antara target dan capaian tersebut, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

1.3. Struktur Organisasi

Sejarah pembentukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terdiri dari Sekretariat dan empat Bidang. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk berdasarkan dan Peraturan Gubernur Jambi masing-masing tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dikukuhkan kembali berdasarkan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Selain terdiri dari Sekretariat dan empat Bidang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan memiliki 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Sejarah pembentukan UPTD yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah terdiri dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertfikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT), UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian (PPP), Pada tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2009 dibentuk satu lagi UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yaitu UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Terakhir melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 Tahun

2011 Tanggal 19 Desember 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan (BPTA & KJ) dan penambahan 3 (tiga UPTD) sesuai Pertaturan Gubernur No. 42 Tahun 2016 dengan bergabungnya Dinas Peternakan yaitu UPTD Pembibitan Ternak, UPTD Kebun Binatang dan UPTD Laboratorium.

Reorganisasi UPTD lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Tahun 2020sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016 sehingga UPTD lingkup Dinas menjadi 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). UPTD tersebut yakni (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertfikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT), (2) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), (3) UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, dan Hortikultura, (4) UPTD Balai Pembibitan Ternak, (5) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (6) UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo, dan (7) UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.

Pengukuhan UPTD tersebut melalui Peraturan Gubernur Jambi yakni UPTD Balai Pengawasan dan Sertfikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) dikukuhkan dengan Pergub 6 Tahun 2020, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dikukuhkan dengan Pergub 11 Tahun 2018, UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, dan Hortikultura dikukuhkan dengan Pergub 12 Tahun 2020, UPTD Balai Pembibitan Ternak dikukuhkan dengan Pergub 8 Tahun 2018, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan dikukuhkan dengan Pergub 7 Tahun 2018, UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo dikukuhkan dengan Pergub 9 Tahun 2018, dan UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dikukuhkan dengan Pergub 10 Tahun 2018.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

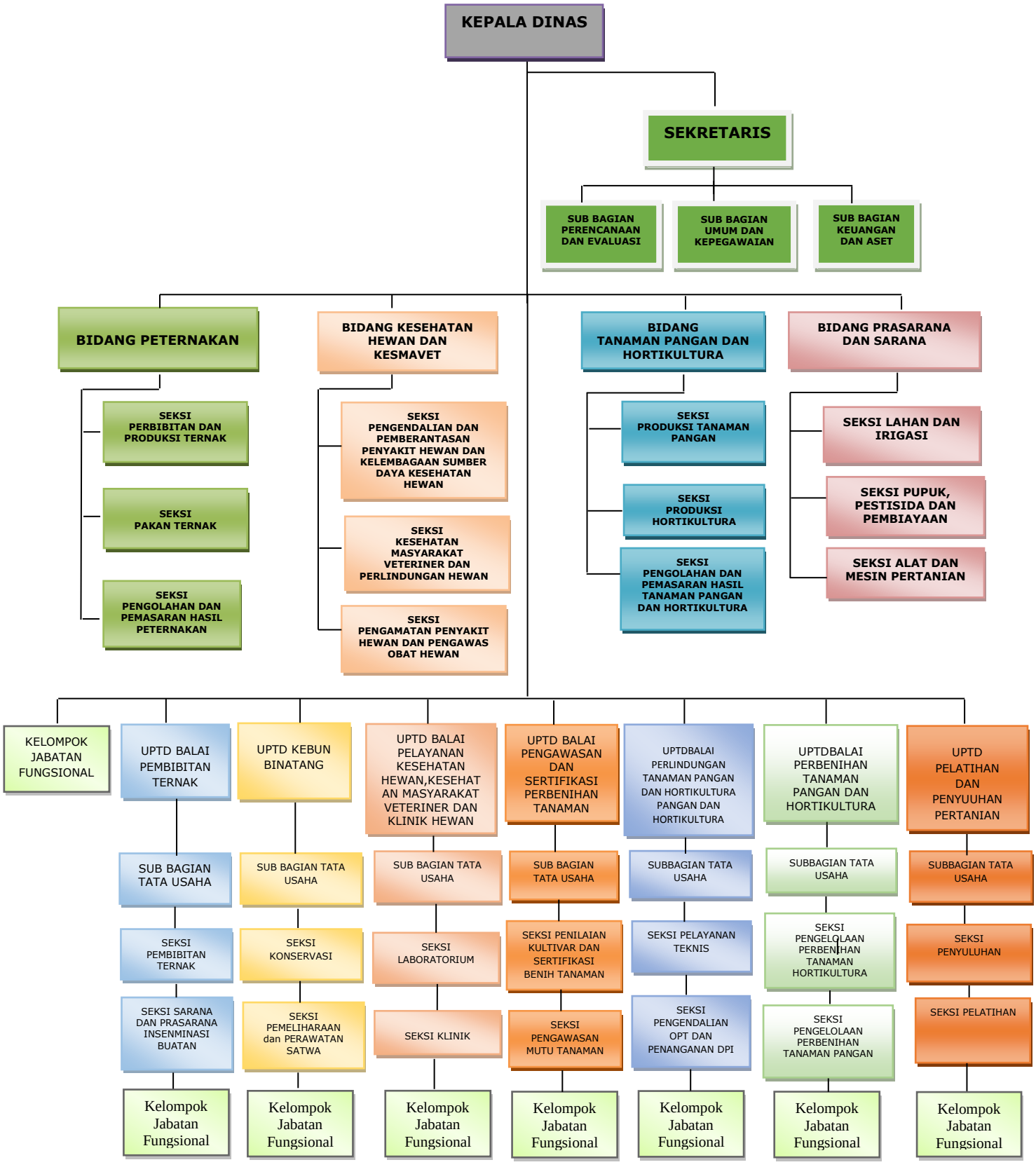

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

a. perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
b. penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
c. penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
d. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e. pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
f. pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
j. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
l. pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
m. pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Pergub Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi diuraikan menurut jabatan eselon adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Fungsional dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan (TP) di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prasarana dan Sarana Pertanian serta Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangkamengoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkup dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan sebagian tugasteknis operasional atau teknis penunjang dalam rangkamelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dilengkapi dengan 3 (tiga) seksi yakni seksi produksi tanaman pangan, seksi produksi hortikultura, dan seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

d. Bidang Prasarana, dan Sarana

Dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan progam dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana. Bidang Prasarana dan Sarana dilengkapi dengan 3 seksi yang terdiri dari seksi

lahan dan irigrasi, seksi pupuk, pestisida dan pembiayaan; dan seksi alat dan mesin pertanian.

e. Bidang Peternakan

Dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pengelolaan dan penjaminan, penyediaan, pengujian,pengawasan, pengendalian, dan memberikan bimbingan teknis serta pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta melaksanakan koordinasi dengan mitra/stakeholder terkait dan pembinaan dibidang peternakan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Peternakan dilengkapi dengan 3 seksi yang terdiri dari seksi perbibitan dan produksi ternak, seksi pakan ternak, dan seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dipimpin seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu dinas dalam rangka melaksanakanpenyusunan bahan kebijakan, memberikan bimbingan teknisserta melakukan pembinaan, penjaminan, pengawasan teknisdan pengendalian di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.. Bidang ini terdiri dari 3 seksi yang terdiri dari seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan, seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan dan seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawas obat hewan, serta kelompok jabatan fungsional.

g. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT)

Dipimpin seorang Kepala UPTD dan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan 3 seksi/subbagian yakni sub bagian Tata Usaha, seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman, seksi Pengawasan Mutu Tanaman, dan kelompok jabatan fungsional. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman bertugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas melaksanakan sebagian tugasteknis operasional/teknis penunjang pada dinas dalam bidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu dan perdagangan benih sertapengelolaan keperbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

h. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)

Dipimpin seorang Kepala UPTD dan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha, seksi Pelayanan Teknis, seksi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, dan kelompok jabatan fungsional. Tugas UPTD adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengamanan produksi dari serangan OPT dan DPI serta pencapaian mutu produk tanaman pangan dan hortikultura yang aman konsumsi.

g. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian (PPP)

Dipimpin seorang Kepala UPTD dan dalam melaksanakan tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional terkait penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian pada dinas. Susunan organisasi UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian sub bagian Tata Usaha, seksi Penyuluhan, seksi Pelatihan, dan kelompok jabatan fungsional.

h. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dipimpin seorang Kepala UPTD dan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha, seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan, seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura, kelompok jabatan fungsional. UPTD PTPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam rangka ketersediaan benih unggul dan bermutu tanaman pangan dan hortikultura.

i. UPTD Balai Pembibitan Ternak

Dipimpin seorang Kepala UPTD dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang peningkatan produksi pangan asal hewani khususnya daging sapi dan kerbau dan melestarikan plasma nutfah. Susunan organisasi UPTD Balai Pembibitan Ternak terdiri dari: sub bagian Tata Usaha, seksi Pembibitan Ternak, seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan, dan kelompok jabatan fungsional.

j. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan

Dipimpin seorang Kepala UPTD dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Susunan

organisasi UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan terdiri dari:sub bagian Tata Usaha, seksi Laboratorium, seksi Klinik, dan kelompok jabatan fungsional.

k. UPTD Kebun Binatang

Dipimpin seorang Kepala UPTD dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan tugas dinas di bidang pelestarian keanekaragaman satwa, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa serta tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau. Susunan organisasi UPTD Kebun Binatang terdiri dari:sub bagian Tata Usaha, seksi Pemeliharaan Satwa, seksi Konservasi, dankelompok jabatan fungsional.

1.5. Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

Tabel 1. Jumlah PNS pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No.	Gol	Laki-laki							Perempuan							Total
		S2	S1	D.3	SLTA	SLTP	SD	Jml	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml	
1	IV : D	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	C	1	2	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	2	5
	B	3	4	-	-	-	-	7	2	2	-	-	-	-	4	11
	A	5	5	-	-	-	-	10	5	6	-	-	-	-	11	21
	Jml G IV	***9***	***12***	***-***	***-***	***-***	***-***	***21***	***9***	***8***	***-***	***-***	***-***	***-***	***17***	***38***
2	III : D	7	31	1	3	-	-	42	6	35	-	2	-	-	43	85
	C	-	15	1	1	-	-	17	3	7	-	-	-	-	10	27
	B	1	10	-	3	-	-	14	2	12	2	1	-	-	17	31
	A	-	6	-	5	-	-	11	-	2	3	1	-	-	6	17
	Jml G III	***8***	***62***	***2***	***12***	***-***	***-***	***84***	***11***	***56***	***5***	***4***	***-***	***-***	***76***	***160***
3	II : D	-	-	-	29	-	-	29	-	-	-	9	-	-	9	**38**
	C	-	-	-	7	1	-	8	-	-	-	2	1	-	3	**11**
	B	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	**3**
	A	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**
	Jml G II	***-***	***-***	***-***	***38***	***2***	***-***	***40***	***-***	***-***	***-***	***12***	***1***	***-***	***13***	***53***
4	I : D	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	**2**
	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**1**
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jml G I	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***1***	***1***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***2***	***-***	***2***
J u m l a h		**17**	**74**	**2**	**50**	**2**	**1**	**146**	**20**	**64**	**5**	**16**	**1**	**2**	**108**	**254**

Tabel 2. Jumlah Jabatan Strukural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

NO	NAMA OPD	JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
1	2	3	4	5	24
1.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN				
	a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	18	25	47	90
	b. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	4	2	2	8
	c. UPTD Balai Pembibitan Ternak	4	7	5	16
	d. UPTD Kebun Binatang	4	1	1	6
	e. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan	4	26	3	33
	f. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	38	11	53
	g. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	3	30	37
	h. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	3	7	1	11
TOTAL		**45**	**109**	**100**	**254**

Tabel 3. Jenis-Jenis Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

No	Jenis Jabatan Fungsional Terentu	Tingkatan Keahlian				Tingkatan Keterampilan			Jumlah
		Pertama	Muda	Madya	Utama	Pemula	Mahir	Penyelia	
1	Penyuluh Pertanian	4	10	5	-				19
2	Pengawas Benih Tanaman	3	2	6	-	3	3	4	21
3	Pengawas Mutu Pakan	1	4	2	-	-	-	-	7
4	Pengawas Bibit Ternak	3	3	2	-	-	-	-	8
5	Medik Veteriner	-	-	1	-	-	-	-	1
6	Paramedik Veteriner	-	-	-	-	-	1	1	2
7	POPT	3	3	2	-	11	3	14	36
8	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1	1	1	-	-	-	-	3
9	Penata Laksana Barang	-	-	-	-	1	1	1	3
10	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	-	6	1	-	-	-	-	7
11	Analis Pasar hasil Pertanian	-	1	1	-	-	-	-	2
Total		**15**	**30**	**21**	**0**	**15**	**8**	**20**	**109**

1.6. Dukungan Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, pada Tahun Anggaran 2022 mengelola anggaran bersumber dari APBD Provinsi setelah refocusing sebesar Rp. 64.287.311.994 (enam puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh uta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).Dana tersebut terbagi kedalam 7 (tujuh) program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Dukungan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022.

SKPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	JUMLAH TOTAL (Rp)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40.232.688.970,-
2. Program Penyediaan dan Pengebangan Sarana Pertanian	12.200.133.178,-
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.122.482.040,-
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.694.572.012,-
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	706.992.922,-
6. Program Perizinan Usaha Pertanian	24.999.910,-
7. Program Penyuluhan Petanian	305.442.962,-
JUMLAH	**64.287.311.994,-**

1.7. Sistematika Penyajian

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022, Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar Laporan Kinerja Tahun 2022 berupa Pengantar; Maksud dan Tujuan; Data Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016, dan Reorganisasi Dinas dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2018, meliputi: uraian tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan PeternakanProvinsi Jambi; serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah; Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan PeternakanProvinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Dinas dan Perjanjian Kinerja 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja, analisis capaian kinerja, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Mengacu Visi Gubernur Jambi yakni ***"Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT (JAMBI MANTAP)"*** dan MISI Pembangunan Provinsi Jambi diantaranya yang berkaitan dengan sektor pertanian yaitu Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan atau ekonomi hijau, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) maka norma – norma pokok dalam pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih mendasari spirit dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Keberpihakan kepada masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan pertanian akan menjadi prioritas utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam melakukan pembangunan pertanian.

Dalam rangka pencapaian Visi Gubernur Jambi tersebut maka disusun Misi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sebagai berikut:

"Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan serta Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) berkelanjutan"

2.2. Tujuan Strategis Dan Sasaran

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima

tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis ini dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*Performance Indicator*) yang terukur.

Sesuai dengan visi dan misi, tujuan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Provinsi Jambi adalah sebagian berikut :

1. Mewujudkan kinerja akuntabilitas, pelayanan public dan keuangan.
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan;
3. Meningkaktan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) berkelanjutan

Sasaran pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Provinsi Jambi adalah sebagian berikut :

1. Tercapainya produktivitas tanaman pangan.
2. Tercapainya Produktivitas Hortikultura.
3. Tercapainya produksi tanaman pangan.
4. Tercapainya luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT
5. Tersedianya Prasarana dan Sarana TPH.
6. Terpenuhinya kebutuhan benih TPH
7. Terwujudnya penggunaan benih bersertifikat dan berlabel
8. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Pertanian dan kelembagaan petani
9. Tercapainya ketersediaan ternak (Sapi dan Kambing).
10. Tercapainya ketersediaan produksi daging.
11. Meningkatnya status kesehatan hewan
12. Meningkatnya pelayanan keswan, kesmavet dan klinik hewan
13. Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan diperlukan kebijakan strategis dalam rangka menciptakan kondisi yang

kondusif untuk perkembangan sistem dan usaha agribisnis melalui strategi pembangunan. Strategi tersebut adalah:

1. Pemberdayaan petani dan aparat pembina

   Prioritas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan petani dan aparat pembina sehingga petani mampu mengelola dan mengembangkan usahataninya secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan upaya – upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pendidikan/ pelatihan, penguatan sarana kerja, dan pemanfaatan pola dan manajemen pembangunan.

   Pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian adalah menempatkan petani sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan pertanian, artinya petani tidak hanya merupakan objek tetapi sebagai subjek pelaku pembangunan. Upaya – upaya untuk memberdayakan petani sebagai subjek pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui fasilitasi dan regulasi pemerintah yang mencakup aspek – aspek perlindungan, keberpihakan dan penciptaan peluang dalam mengembangkan usaha ekonomi petani.

   Aparat Pembina dalam pembangunan pertanian adalah petugas yang diberi mandat untuk mendampingi petani dilapangan dalam melaksanakan kegiatan usahatani, baik teknis maupun mempersiapkan administrasi dalam melakukan usahatani tersebut.
2. Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana pertanian

   Melaksanakan pengembangan lahan dan air melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian melalui optimalisasi lahan terlantar / tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani). Disamping itu perlu ditingkatkan sarana dan prasarana pertanian berupa penyediaan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan serta sarana produksi pertanian lainnya.
3. Mendorong akselerasi peningkatan produktivitas, produksi dan mutu melalui penerapan teknologi

   Peningkatan produktivitas selama ini masih belum optimal, terutama didaerah pasang surut. Dari segi potensi di Provinsi Jambi produktivitas masih berpeluang besar

untuk ditingkatkan. Potensi tersebut tercermin dari masih adanya senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian.

Untuk mendorong peningkatan produtivitas perlu dilakukan pewilayahan sesuai tingkat produktivitas yang ada, kondisi daerah, tingkat penerapan teknologi, serta kesiapan sarana prasarana pendukung. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi dan berwawasan lingkungan, yang disertai pengembangan rekayasa sosial dan ekonomi.

4. Mendorong percepatan diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura

Dalam rangka mengantisipasi meningkatnya konsumsi beras sejalan dengan pertambahan penduduk, maka dilakukan upaya diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura. Upaya ini selain akan berdampak terhadap peluang pemanfaatan keragaman potensi ekologi, juga memperluas kesempatan untuk menumbuh kembangkan usaha agribisnis.

Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan dan hortikultura saat ini masih belum optimal. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar.

Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dll.

5. Mendorong peningkatan efisiensi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan effisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk. Namun demikian perlu adanya upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, khususnya padi.

Untuk itu perlu dilakukan penyediaan alat perontok padi dan revitalisasi mesin penggilingan padi serta penyediaan lantai jemur di daerah sentra. Disamping itu, disetiap kabupaten perlu didorong adanya pusat – pusat penjualan beras lokal yang

dikelola oleh poktan/gapoktan, sehingga beras yang diproduksi oleh daerah Jambi dapat dinikmati oleh masyarakat jambi dengan kualitas yang baik dan harga bersaing.

6. Meningkatkan populasi jumlah ternak

Dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengatasi kelangkaan pangan yang bersumber dari hewani maka diperlukannya peningkatan jumlah hewan ternak melalui program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan jumlah populasi hewan ternak guna permasalahan tersebut dapat teratasi serta nilai kesejahteraan peternakan dapat ditingkatkan.

7. Meningkatkan persentase kesehatan hewan yang aman, sehat, utuh dan halal

Perlunya pengawasan dan peningkatan mutu terhadap hewan ternak baik ruminansia dan non ruminansia dalam pengelolaannya sehingga kendala yang terjadi seperti berbagai penyakit, kesehatan hewan, keutuhan nilai gizi, dan kehalalan dari produksi hewan ternak dapat di minimalisir sehingga publik dan masyarakat maupun pelaku usaha ternak dapat menerima manfaat dan *opportunity* dari suatu nilai usaha ternak itu sendiri.

Kebijakan yang berkaitan dengan pertanian dan berada dalam kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan yang perlu penanganan, antara lain adalah :

1. Peningkatan Keterampilan Petani Dan Petugas Serta Peningkatan Pendidikan Pertanian Tingkat Menengah;
2. Pemberdayaan Dan Penguatan Sistem Kelembagaan Pertanian Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
3. Mendorong Akselerasi Peningkatan Produktivitas, Produksi Dan Mutu Melalui Penerapan Teknologi;
4. Mendorong Percepatan Diversifikasi Produksi Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
5. Penyediaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pertanian;
6. Mendorong Peningkatan Efisiensi Pasca Panen, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil; serta
7. Penerapan Teknologi Pertanian yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.

Penerapan strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi akan dituangkan dalam empat kebijakan utama yaitu:

- Kebijakan peningkatan ketersediaan dan kualitas bibit ternak.
- Kebijakan peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan.
- Kebijakan peningkatan jaminan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
- Kebijakan peningkatan pelayanan prima pada masyarakat peternakan.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan kedua peraturan tersebut diatas (Perpres No. 29/2014 dan Permen PAN & RB No. 53/2014),

Perjanjian kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui PK, diharapkan dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada Tahun2022, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen PK yang ditandatangani pada Bulan Januari 2022. Pada tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memiliki perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura;	1. Persentase peningkatan produktivitas Tanaman Pangan (padi dan jagung) 2. Persentase Produktivitas tanaman Hortikultura (cabe merah dan bawang merah)	1,80 % 2 %
2.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	1. Persentase peningkatan produksi padi 2. Persenatase Peningkatan Produksi Jagung	4,68 % 1,99%
3.	Meningkatnya Populasi Ternak	1. Persentase peningkatan populasi sapi 2. Persentase peningkatan populasi kambing	1,99% 1,99 %
4.	Meningkatnya Produksi Daging	1. Persentase peningkatan produksi daging sapi 2. Persentase peningkatan produksi daging kambing	5,76 % 1 %
5.	Meningkatnya Produksi Unggas	1. Persentase peningkatan produksi ayam buras 2. Persentase peningkatan produksi ayam ras petelur 3. Persentase peningkatan produksi ayam ras pedaging 4. Persentase peningkatan produksi itik	6,61% 1,39% 61,65% 0,53% 25,74%
6.	Meningkatnya luas areal pengendalian dan enanggukangan bencana OPT	1. Persentase peningkatan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencan OPT	71 85
5.	Meningkatnya kinerja akuntabilitas, pelayanan public dan keuangan	1. Nilai AKIP 2. Skor IKM	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun. Laporan Kinerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai :

1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dinas.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang dipakai telah ditetapkan, pengukuran tersebut dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja *input, output* dan *outcome*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian indikator sasaran umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi *Input, Output dan Outcome*. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja Input yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah (Rp). Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan seperti sumberdaya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data dan dana.Indikator *output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator *outcome*, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.

Pengukuran capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup :

(1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
(2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tercapainya Produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	1,80	-3,35	-186,1
2	Tercapainya Produktivitas tanaman hortikultura (Cabe Merah dan Bawang Merah)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Cabe Merah dan Bawang Merah)	%	2	11,73	586,5
3	Tercapainya produksi tanaman pangan	Produksi Padi	Ton GKG	416.223	289.276,78	69,5
		Produksi Jagung	Ton GKG	67.826	33.207,7	48,9
4	Tercapainya peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana OPT terhadap luas tanaman Pangan dan Hortikultura.	Persentase peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (%) terhadap luas tanaman angan dan Hortikultura.	%	25,74	23,35	90,7
5	Tercapainya ketersediaan ternak (Sapi dan Kambing)	Populasi Sapi	Ekor	162.002	162.002	100
		Populasi Kambing	Ekor	412.473	429.393	104,1
6	Tercapainya ketersediaan produksi daging	Produksi daging sapi	Ribu Ton	5,76	5.76	118
		Produksi daging kambing	Ribu Ton	1,00	0,71	71
		Produksi daging Ayam buras	Ribu Ton	6,61	10,1	152
		Produksi daging Ayam Ras Petelur	Ribu Ton	1,37	2,2	160
		Produksi daging Ayam Ras Pedaging	Ribu Ton	61,65	53,4	87
		Produksi daging Itik	Ribu Ton	0,53	0,53	100

Catatan **:** Data Tahun 2022 Angka Sementara

Dalam rangka pelaksanaan `kegiatan yang telah diuraikan diatas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dari realisasi capaian kinerja Tahun 2022 terlihat bahwa target ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai.

Tabel 7. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target	Realisasi
1	Tercapainya Produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	1	Persentase peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (padi dan jagung)	1,80%	-3,35%
2	Tercapainya Produktivitas tanaman hortikultura (Cabe Merah dan Bawang Merah)	2	Persentase Produktivitas Hortikultura (Cabe merah dan bawang merah)	2%	11,73%
3	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan	1	Persentase peningkatan produksi padi	4,68%	-2,97%
		2	Persentase Peningkatan produksi jagung	1,99%	-29,60%
4	Meningkatnya Populasi Ternak	1	Persentase peningkatan populasi sapi	1,99%	0,56%
		2	Persentase peningkatan populasi kambing	1,99%	2,30%
5	Meningkatnya Produksi Daging	1	Persentase peningkatan produksi daging sapi	5,76%	24,18%
		2	Persentase peningkatan produksi daging kambing	1%	2,30%
6	Meningkatnya Produksi Unggas	1	Persentase peningkatan produksi ayam buras	6,61%	5,43%
		2	Persentase peningkatan produksi ayam ras petelur	1,39%	208,20%
		3.	Persentase peningkatan produksi ayam ras pedaging	61,65%	10,16%
		4	Persentase peningkatan produksi itik	0,53%	0,22%
7	Meningkatnya luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	1	Persentase peningkatan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	25,74%	23,35%
8	Meningkatnya kinrja akuntabilitas, pelayanan public dan keuangan	1	Nilai AKIP	71	72
		2	Skor IKM	85	82,487

Sumber Data : Dinas TPH-Nak dan BPS (Angka Sementara 2022)

Berdasarkan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2022 pada Sasaran komoditas padi dan jagung untuk target produksi padi dan jagung sebesar 1,80 % terealisasi sebesar -3,35 %, Persentase peningkatan produksi padi dengan target 4,68 % terealisasi sebesar -2,97 % dan Persentase peningkatan produksi jagung dengan target 1,99 % terealisasi sebesar -29,60 % tidak tercapainya target produktivitas dan produksi ini disebabkan karena pada Tahun 2022 terjadi perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan banjir dan kekeringan pada lahan padi dan jagung seluas 3.650,55 Ha. Disamping itu penurunan produksi juga disebabkan oleh serangan hama dan penyakit. Tercatat pada tahun 2022 terjadi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seluas 5.996,35 Ha. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke penggunaan lain seperti peti dan perkebunan hal ini dapat di lihat dari menurunnya minat petani untuk bercocok tanam padi dan jagung. Sebagian petani lebih tertarik ke sektor perkebunan dan penambangan emas ilegal yang berdampak pada penurunan luas panen padi dari 64.412,26 Ha menjadi 63.760,91 Ha dan penurunan luas panen jagung dari 7547,3 Ha menjadi 5584,7 Ha. Adanya Perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS menghasilkan selisih sekitar 100% lebih rendah jika dibandingkan dengan metode SIMTP (Sistim Informasi Manajemen Tanaman Pangan) yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi.

Produktivitas komoditas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh profil budidaya yang dijalankan oleh petani, seperti jenis lahan, teknik penanaman, penggunaan sarana dan prasarana produksi, serta faktor lain, seperti program bantuan pemerintah, keanggotaan kelompok tani (institusi petani) dan dampak perubahan iklim. Hasil Survei Ubinan memungkinkan analisis untuk menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut berdampak terhadap tingkat produktivitas. Sedangkan Penyebab penurunan produksi adalah karena hama atau penyakit, kekeringan, hingga banjir. Hal ini disebabkan juga karena pada Tahun 2022 terjadi Refocusing anggaran pada beberapa kegiatan untuk kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sementara untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Populasi Ternak terjadi penurunan capaian pada indikator Persentase peningkatan populasi ternak sapi sebesar 0,56 % dari target 1,99% di lihat dari populasi tahun 2021 sebesar 161.100 ekor dan tahun 2022

sebesar 162.002 ekor. Hal ini terdampak dari terjadinya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan kematian ternak sapi, Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dan tradisuonal dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan dan masih terjadinya pemotongan sapi betina produktif.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang.

Capaian indikator sasaran yang dituangkan dalam Renstra dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak di lakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan.Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab – akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi JambiTahun 2022 dengan realisasi capaian Tahun 2021 dan 2020. Perbandingan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian		Capaian 2022		
			2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Produksi padi	ton	386.414,6	298.149,2	416.223	289.276,78	69,5
	Produksi jagung	ton	85.787	47.171,4	67.826	33.207,7	48,9
2	Produksi tanaman Cabai Merah	kw	471.331	471.331	494.897	866.437	175,07
	Produksi Tanaman Bawang Merah	kw	119.766	132.637	125.753	150.876	119,98
3	Produktivitas padi	kw/ha	45,58	46,29	47,07	45,3	96,24
	Produktivitas jagung	kw/ha	69,77	62,50	63,54	59,4	93,48
4	Populasi ternak sapi	ekor	158.824	161.100	162.002	162.002	100
	Populasi ternak kambing	ekor	404.385	419.741	412.473	429.393	104,1
5	Produksi daging sapi	Ribu ton	5,54	5,63	5,76	5.76	118
	Produksi daging kambing	Ribu ton	0,98	0,7	1	0,71	71
	Produksi daging Ayam buras	Ribu ton	5,59	9,66	6,61	10,1	152
	Produksi daging Ayam Ras Petelur	Ribu ton	1,37	0,73	1,37	2,2	160
	Produksi daging Ayam Ras Pedaging	Ribu ton	44,61	48,54	61,65	53,4	87
	Produksi daging Itik	Ribu ton	0,51	0,5	0,53	0,53	100

Sumber Data **:** Dinas TPH-Nak dan BPS (Angka Sementara 2022)

Dari realisasi capaian kinerja Tahun 2022 disandingkan dengan capaian Tahun 2021 dan 2020 terlihat bahwa target ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Untuk target yang tidak tercapai disebabkan karena pada Tahun 2022 terjadi karena perubahan iklim yang extrim, serangan organisme pengganggu tanaman, rendahnya minat petani dan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu terjadi Refocusing anggaran pada beberapa kegiatan untuk penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang Ternak sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang telah ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Pertanian

khususnya di Sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan secara umum dapat dikatakan cukup baik.Kondisi ini dapat dilihat melalui Tabel 8 berikut ini :

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator	Satuan	Awal RPJMD 2022	Capaian			Target 2022	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				2020	2021	2022		
1	Produksi padi	Ton GKG	666.039	386.413	298.149	289.277	416.223	69,50
	Produksi jagung	Ton GKG	56.896	85.787	67.596	33.208	67.826	48,96
2	Produksi tanaman Cabai Merah	kw	480.757	457.909	471.330	866.437	494.897	175,07
	Produksi Tanaman Bawang Merah	kw	122.160	114.831	119.765	150.876	125.753	119,98
3	Produktivitas padi	kw/ha	46,33	45,58	46,29	45,3	47,07	96,24
	Produktivitas jagung	kw/ha	63,38	69,77	89,57	59,4	63,54	93,48
4	Produktivitas tanaman Cabai Merah	kw/ha	120,46	107,94	118,1	145,75	120,46	120,99
	Produktivitas Tanaman Bawang Merah	kw/ha	75,81	68,41	74,32	74,35	75,81	98,07
5	Populasi ternak sapi	ekor	162.002	158.824	161.100	162.002	162.002	100,00
	Populasi ternak kambing	ekor	429.393	404.385	419.741	429.393	412.473	104,10
6	Produksi daging sapi	Ribu ton	5,76	5,54	4,63	5,76	5,76	100,00
	Produksi daging kambing	Ribu ton	1	0,98	0,70	0,71	1	71,00
	Produksi daging Ayam buras	Ribu ton	6,61	5,59	9,66	10,18	6,61	154,01
	Produksi daging Ayam Ras Petelur	Ribu ton	1,37	1,37	0,73	2,26	1,37	164,96
	Produksi daging Ayam Ras Pedaging	Ribu ton	61,65	44,61	48,54	53,48	61,65	86,75
	Produksi daging Itik	Ribu ton	0,53	0,51	0,50	0,50	0,53	94,34

Catatan **:** Data Tahun 2022 Angka Sementara
Sumber : Dinas TPH-Nak dan BPS (Angka Sementara 2022)

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 pada beberapa Indikator Kinerja dalam RPJMD (2021 – 2026) mengalami penurunan dari Tahun 2022 dan 2021 baik itu produksi padi dan jagung. Begitu juga dengan produktivitas padi dan jagung. Hal ini terjadi turunnya luas panen padi dan jagung. Hal ini disebabkan karena terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dampak perubahan iklim yang ektrim, serangan hama dan penyakit serta pada Tahun 2022 telah terjadi refocusing anggaran baik itu anggaran APBD maupun APBN untuk dana penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Refocusing anggaran ini berdampak pada tidak tercapainya beberapa target Renstra yang telah ditetapkan.

Walaupun dengan anggaran yang terbatas akibat refocusing penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada Tahun 2021 tetap melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target Renstra yang telah ditetapkan baik itu program kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN.

Sementara untuk produksi tanaman cabai merah, bawang merah mengalami kenaikkan dibanding Tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran terhadap kegiatan tersebut, dimana untuk anggaran kegiatan tanaman cabai merah, bawang merah, tidak mengalami refocusing anggaran.

Sedangkan untuk subkegiatan Peternakan pada sasaran populasi ternak sapi, kambing, produksi daging sapi, kambing dan unggas mengalami peningkatan realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan Tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan peternakan.

Alternatif solusi dari turunnya realisasi capaian kinerja Tahun 2022 yaitu harus ada dukungan anggaran baik itu dari program kegiatan APBD maupun APBN untuk mencapai target Renstra yang telah ditetapkan. Dengan adanya dukungan anggaran, program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

5. Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Pendukung Kinerja

a. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sektor perkebunan (sawit) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang illegal (*Illegal Mining*).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat pengggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada dibeberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

b. Terjadinya Perubahan Iklim

Pada tahun 2022, terjadinya kekeringan dan banjir yang cukup tinggi dan diperparah dengan dampak kebakaran hutan di Provinsi Jambi. Suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian. Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya tidak ada. Ancaman

banjir yang semakin sering terjadi pada lahan sawah juga merupakan salah satu dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas areal panen dan produksi padi. Dampak pergesaran musim tanam mengakibatkan jadwal tanam akan terganggu yang mengakibatkan menurunnya angka produksi dan bahkan kegagalan panen.

c. Masih beragamnya produksi tanaman pangan yang dihasilkan petani

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cendrung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran.

Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

a) Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanaman petani belum maksimal.
b) Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.
c) Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :
    - Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
    - Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
    - Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
    - Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.

- Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
- Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.

d) Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.

e) Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.

d. Masih berfluktuatifnya Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura yang dihasilkan

Tanaman hortikultura, khususnya buah – buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur- sayuran, pada saat–saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktiatif pula. Disamping itu kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya.

- Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
- Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
- Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

e. Relatif masih terbatasnya Managerial Usaha Tani dan Kualitas Sumber daya yang relatif masih rendah.

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta

jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efesiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Disadari saat ini tingkat pendidikan dan keterampilan petani masih ada yang rendah. Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat, serta masih ada yang belum memiliki wawasan bisnis luas. Selain itu banyak petani menjadi sangat tergantung pada bantuan/pemberian pemerintah. Keterampilan petani yang rendah terkait dengan rendahnya pendidikan dan kurang dikembangkannya kearifan lokal (*indigenous knowledge*).

Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain :

- Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.
- Masih relatif Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten / Kota.

f. Persaingan produk import

Daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura dari provinsi Jambi umumnya masih relatif rendah sehingga senantiasa dihadapkan persaingan dipasaran regional dan nasional serta internasional. Rendahnya daya saing tersebut antara lain disebabkan oleh :

a. Kualitas dan Mutu produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan umumnya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi memenuhi standar kualitas eksport
b. Tingkat efesiensi usaha tani saat ini masih perlu diupayakan secara terus menerus agar harga satuan produk yang dihasilkan dapat dapat bersaing dipasaran.
c. Masih Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.

d. Produksi buah-buahan dan sayur – sayuran sering melimpah pada waktu panen raya sehingga sangat sulit untuk dipasarkan dengan harga yang wajar, baik pada pasar regional maupun ekspor.

g. Rendahnya Nilai tambah produk.

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan uasahatani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dan masih relatife jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik. Bebarapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tamabah produk tersebut adalah :

a. Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
b. Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.

h. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru *(invention)* dan pengembanganteknologi yang sudah ada *(innovation)* hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdanai, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga mubajir dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (*Good Handling Procedure*) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.

Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.

i. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

j. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :

a. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
   - Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
   - Perlatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
   - Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai
   - Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
   - Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD.
b. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kreteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
c. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.

d. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
e. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

k. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui pertambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT. Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh :

a. Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
b. Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.
c. Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsin (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

l. Masih Kurangnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan

Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :

a. Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
b. Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.

c. Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikutlura (kentang).
d. Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

m. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

n. Usaha peternakan yang bersifat Subsiten dan rendahnya partisipasi kelembagaan Peternak.

Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan, khususnya untuk usaha ternak besar dan kecil. Hampir 95% juta rumah tangga peternak tinggal di pedesaan dan tersebar diberbagai wilayah dengan orientasinya masih peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dengan manajemen atau sistem pngelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan peternakan karena dibentuk dari, oleh, dan untuk peternak. Rendanya partisipasi peternak yang mengikuti bimbingaan penyuluhan

usaha peternakan terkait pengolahan hasil produksi, pengobatan ternak dan penyusunan ransum merupakan informasi yang paling dibutuhkan oleh peternak.

p. Keterbatasan lahan untuk subsektor peternakan

Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah kepastian lahan dan semakin berkurangnya lahan peternakan karena kebutuhan lahan sektor pertanian lainnya lebih diutamakan. Tidak semua daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan termasuk penyediaan padang gembala untuk penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Selain itu, sebagian besar usaha peternakan merupakan skala rumah tangga dan lokasinya disekitar rumah, sehingga diperlukan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, diantaranya :

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan

Indikator dari sasaran mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan produksi dan ketahanan pangan dapat dilihat dari produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan tahun 2022. Untuk mencapai peningkatan produksi ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa: Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung UPSUS, perbanyakan benih sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kegiatan pembinaan perlindungan OPT, program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.

Sasaran meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi beras ke non beras. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal, dan mengajak masyarakat agar mengubah

pola pikir, bahwa beras/nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber pangan lokal seperti umbian, sukun, jagung, sagu dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras.

3. Berkembangnya Usaha Agribisnis

Sasaran berkembangnya usaha agribisnis dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah dan jenis petani yang bergerak dibidang usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi pada tahun 2022.

Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan kualitas mutu dan gabah dalam rangka peningkatan rendemen beras di Provinsi Jambi, perbanyakan bibit buah-buahan (duku, durian dan jeruk), ekspose hasil pertanian, pelestarian plasma nutfah, pengembangan varietas unggul nenas Tangkit, pembinaan dan pengembangan buah unggulan, pembinaan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pengembangan hortikultura pada daerah agrowisata, pengembangan KAHS, analisa usahatani tanaman pangan dan hortikultura, pemantauan usaha pengolahan dan pasca panen, pemantauan harga gabah, usaha perbaikan pasca panen tanaman pangan, penyediaan benih untuk rawa lebak melalui penumbuhan penangkaran benih dan penyediaan bibit ternak ayam, itik, kambing dan sapi.

4. Tersedianya Benih/Bibit yang Bermutu dari Varietas Unggul dengan Harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan

Indikator keberhasilan dari tersedianya benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan adalah produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan berupa Pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi dan Pengembangan Usaha dan kelembagaan Perbenihan Hortikultura serta perbanyakan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura serta pengadaan sarana dan prasarana balai benih kentang di Kabupaten Kerinci (BBH Kayu Aro).

5. **Meningkatnya Penggunaan/Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.**

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator pelaksanaan forum perbenihan baik untuk komoditas pangan maupun untuk komoditas hortikultura. Pada tahun 2021 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan penggunaan/penanaman benih bermutu varietas unggul dilaksanakan forum perbenihan tanaman pangan sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh penangkar benih, pengusaha benih dan penangkar benih. Sedangkan untuk forum perbenihan hortikultura dilaksankan sebanyak 1 kali.

Untuk mendukung percapaian sasaran ini juga dilakukan kegiatan – kegiatan berupa penangkaran benih di tingkat petani, rapat koordinasi dalam rangka penyediaan/perbanyakan benih varietas unggul bermutu, rapat koordinasi dalam rangka pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyakan benih sumber padi varietas unggul lokal.

6. **Tumbuh kembangnya Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu.**

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator jumlah dan jenis Balai Benih serta penangkar yang dapat menghasilkan benih dimana benih tersebut dapat dipergunakan oleh para petani dalam melaksanakan usaha lainnya.Dalam pencapaian sasaran ini dilakukan kegiatan berupa Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyakan benih pokok dan benih sebar, Perbanyakan benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyakan benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyakan benih palawija BS – FS dan FS – SS , jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyakan benih palawija, Pengembangan taman anggrek ria loka, Operasional kegiatan taman anggrek dan Pengembangan kultur jaringan.

7. **Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator demplot, pengujian dan demontrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani

dengan teknologi maju untuk tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan berupa Bimbingan percontohan perbaikan usahatani Padi, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan kering, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan bera/tidur, tan produktivitas padi dilahan bera/tidur, Bimbingan percontohan perbaikan pola tanam padi didaerah rawa lebak.

8. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan secara selektif

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetak sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan renovasi lahan sulfat masam dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada.

Peningkatan kesuburan Lahan terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.

Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN. Sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pompa air.

9. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru (terutama penggunaan benih Unggul)

Produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cendrung stagnan. Hal ini karena selama ini produktivitas yang dihasilkan masih rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas benih yang dipergunakan. Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin

dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produtivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani mempergunakannya. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat.

a) Keterbatasan modal petani untuk membeli saprodi dilakukan dengan memberikan bantuan Benih , dan saprodi lainnya secara selektif. Namun demikian petani diupayakan menggunakan pupuk alami dengan menggunakan trchokompos dan pengendalian OPT dengan Herbisida alami pula yang tersedia disekitar tempat tinggal.
b) Untuk meningkatkan keyakinan petani terhadap teknologi baru, maka dilakukan kegiatan demplot – demplot, Sekolah lapang dan SLPHT.
c) Sosialisasi tentang pentingnya penggunaan benih unggul bermutu terus dilakukan, agar ketersediaan benih secara 6 tepat bisa terpenuhi, diantaranya mengupayakan kegiatan penangkaran benih di setiap kecamatan dan Kabupaten atau di sentra produksi
d) Meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi petani dalam mewujudkan efisiensi biaya produksi dan meningkatkan produksi pertanian melalui SLPHT, penerapan PHT dan penggunaan bahan saprodi / pengendali OPT yang sifatnya ramah lingkungan, efisiensi dan efektif seperti penggunaan kompos jerami (*Trichokompos*) sebagai sumber pupuk serta penggunaan agen hayati / biopestisida dalam pengendalian OPT.

10. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru.

Daya saing produk sangat ditentukan oleh kualitas dan mutu produk yang bersangkutan serta efisiensi untuk menghasilkan produk tersebut. Kualitas yang baik, mutu yang terjamin dan harga yang relatif murah dalam memproduksinya akan mudah dipasrkan dan akan muda bersaing dipasaran.

Peningkatan mutu produk ditujukan untuk peningkatan daya saing, nilai tambah dan pendapatan pelaku usaha. Mutu produk tergantung pada berbagai faktor, antara lain :

penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta penerapan teknik distribusi produk yang benar.Upaya yang ditempuh diantaranya :

a) Meningkatkan Kualitas dan mutu produk, serta packing produk melalui inovasi teknologi baru.
b) Meningkatkan efisiensi produksi dengan menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dan mutu produk.
c) Meningkatkan wawasan dan pemahaman petugas tentang standar mutu pasar suatu produk, baik di lokal maupun regional / internasional.
d) Pengaturan produksi sayur-sayuran dan menerapkan teknologi ”*off season*” untuk Komoditi bernilai tinggi.

11. Mendorong Peningkatan Nilai tambah Produk dan Diversifikasi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Nilai tambah suatu produk akan bernilai tinggi apabila kegiatan usaahatani dilanjutkan dengan pengmbangan lanjutan terhadap produk yang dihasilkan. Kegiatan tersebut tidak hanya terbatas pada dihasilkannya sampai panen dan pasca panen, namun ditambah lagi dengan kegiatan olahan lanjutan. Disamping itu kegiatan lain adalah melalui diversifikasi produk, sehingga komoditas yang dihasilkan bisa beragam.

Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan saat ini masih belum dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar. Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dan lainnya.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk, beberapa upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain :

a) Melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan olahan lanjutan bagi ibu – ibu di pedesaan.
b) Mensosialisasikan sistim pengemasan/packing yang baik dan benar guna meningkatkan nilai jual produk.

Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan nasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, antara lain melalui : peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

12. Mempercepat Transfer Teknologi Dan Tepat Sasaran

Mempercepat transfer teknologi pertanian ke petani melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

a) Bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang , baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Sekolah lapang, artinya sekolah bagi petani yang dilaksanakan dilapangan dan materinya disesuaikan dengan umur pertanaman di lokasi laboratorium lapangan. Peserta adalah utusan kelompok yang mdah menerima teknologi dan mempunyai kemampuan untuk menularkan ke anggota kelompok taninya.
b) Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas dibeberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan kepetani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.
c) Pengelolaan pertanaman dilaksanakan oleh petani dengan bimbingan petugas, sehingga petani langsung menerapkan apa yang diperoleh dan mengatasi segala permasalahan yang muncul selama proses pertanaman berlangsung.

13. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder

Kewenangan pemerintah Provinsi dibandingkan pemerintah Kabupaten semakin terbatas sebagimana halnya kewenangan Pusat yang hanya meliputi perumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur. Oleh karena itu pembangunan pertanian perlu dirancang untuk lebih memfasilitasi berkembangnya inisiatif masyarakat dan seluruh stakeholder. Dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 yang telah diperbaiki melalui UU No.32 Tahun

2004, dan diganti dengan UU No.23 tahun 2014 Provinsi dan Kabupaten perlu untuk meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk membangun pertanian didaerahnya.

Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahatani didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan stakeholder (PT. SHS dan PT Pertani), sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.

14. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

15. Pemberdayaan Petani Dan Masyarakat.

Prioritas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan petani dan masyarakat sehingga mereka mampu mengelola dan mengembangkan usahataninya secara mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu kapasitas aparat pertanian didaerah masih belum memadai untuk dapat mendorong dan mengkoordinir pembangunan pertanian. Untuk itu diperlukan upaya – upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pendidikan/pelatihan dan pemanfaatan pola dan manajemen pembangunan. Pola pembangunan yang ditetapkan selama ini yang masih diwarnai pendekatan pemberian yang bersifat cuma – cuma sudah mulai dikurangi. Pembangunan saat ini sudah diarahkan dengan pendekatan program dengan melibatkan peran aktif dan sharing dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang seluas –luasnya.

Bantuan alsintan sudah mulai dalam bentuk Bantuan Uang muka Alsin (BUMA), dimana petani atau kelompok tani harus menyiapkan dulu dana tambahan pembelian alat, baru dana dari pemerintah diberikan ke kelompok tersebut.

Kelembagaan pangan dan agribisnis guna menopang pemberdayaan petani adalah :

a. Kelembagaan produksi, khususnya kelompok tani adalah kelompok pada kesatuan terkecil yang terbentuk dikalangan petani untuk menggalang persatuan anggota – anggotanya(Koptan dan Gapoktan)
b. Kelembagaan irigasi,khususnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
c. Kelembagaan lumbung pangan desa adalah kelompok warga masyarakat yang dibentuk untuk menggalang persatuan mereka dalam menyimpan bahan makanan yang dapat mereka ambil dan pergunakaan ketika mereka memerlukan untuk maksud – maksud konsumsi sendiri.

16. Meningkatkan Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

17. Meningkatkan Efisiensi Usahatani, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan effisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang effisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk. Namun demikian upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, melalui penggunaan Power Threser pada saat perontokan dan penggunaan terpal plastik pada saat penjemuran (apabila lantai jemur belum tersedia) khususnya padi, jagung dan Kedelai.Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sangat baik dengan nilai persentase pencapaian untuk dana APBD sebesar 94,11% dengan realisasi fisik sebesar 94,31% dan untuk dana APBN sebesar 94,40% dengan realisasi fisik 99,87 %. Adapun rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Anggaran APBN Dinas TPH-Nak Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022

NO	Satker	Pagu DIPA (Rp.)	Realisasi Keuangan		Fisik %	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)	%		
1	SATKER TP PANGAN (109119)	14.355.543.000	14.284.222.777	99,50	100	71.320.223
2	SATKER DK PANGAN (109065)	2.435.641.000	2.402.137.500	98,62	100	33.503.500
3	SATKER TP HORTIKULTURA (109905)	2.736.312.000	2.716.138.544	99,26	100	20.173.456
4	SATKER DK HORTIKULTURA (109005)	4.438.360.000	4.430.091.887	99,81	100	8.268.113
5	SATKER TP PSP (109125)	29.305.387.000	28.613.096.180	97,64	100	692.290.820
6	SATKER DK PSP (109007)	1.407.975.000	1.397.694.369	99,27	100	10.280.631
7	SATKER DK PKH (109121)	12.503.843.000	9.375.807.624	74,98	98,97	3.128.035.376
8	SATKER DK BPPSDMP (418000)	6.735.992.000	6.566.511.600	97,48	100,00	169.480.400
Total APBN		73.919.053.000	69.785.700.481	94,40	99,87	4.133.352.519

Sumber : Laporan Simonev DTPH-Nak Provinsi Jambi Tahun 2022

Tabel 11. Realisasi Anggaran APBD Dinas DTPH-Nak Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022

NO	OPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	PAGU DPA		PERKEMBANGAN PELAKSANAAN		
		APBD MURNI Rp.	APBD PERUBAHAN Rp.	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK%
				Rp.	%	
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan					
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**43.077.860.071**	**40.232.688.970**	**37.758.703.709**	**93,85**	**93,87**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	740.012.823	742.448.543	607.140.750	*81,78*	82,71
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.362.415.675	36.222.703.094	33.896.880.729	*93,58*	93,58
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253.797.820	267.791.600	267.545.200	*99,91*	99,91
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.303.966	278.872.966	278.772.717	*99,96*	99,96
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	871.668.787	942.711.767	942.110.150	*99,94*	99,94
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.658.661.000	1.778.161.000	1.766.254.163	*99,33*	99,33
II	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**15.813.315.278**	**12.200.133.178**	**11.636.450.529**	**95,38**	**95,41**
7	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.609.000.000	4.553.773.372	4.479.330.771	*98,37*	98,37
8	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.551.000.000	1.551.000.000	1.506.627.725	*97,14*	97,34
9	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12.133.308.200	5.575.352.728	5.156.415.013	*92,49*	92,49
10	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	520.007.078	520.007.078	494.077.020	*95,01*	95,01
III	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.384.139.400**	**8.122.482.040**	**7.665.828.312**	**94,38**	**94,38**
11	Penataan Prasarana Pertanian	5.384.139.400	8.122.482.040	7.665.828.312	*94,38*	94,38
IV	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**2.659.572.012**	**2.694.572.012**	**2.421.749.890**	**89,88**	**94,38**
12	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.093.265.000	2.093.265.000	1.854.544.962	*88,60*	93,37
13	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	178.307.012	178.307.012	145.835.800	*81,79*	93,81
14	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	388.000.000	423.000.000	421.369.128	*99,61*	99,61

NO	OPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	PAGU DPA		PERKEMBANGAN PELAKSANAAN		
		APBD MURNI Rp.	APBD PERUBAHAN Rp.	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK%
				Rp.	%	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**471.992.922**	**706.992.922**	**691.674.950**	**97,83**	**97,83**
15	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	471.992.922	706.992.922	691.674.950	*97,83*	97,83
VI	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**24.999.910**	**24.999.910**	**24.772.260**	**99,09**	**99,09**
16	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.999.910	24.999.910	24.772.260	*99,09*	99,09
VII	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**305.442.962**	**305.442.962**	**301.694.016**	**98,77**	**98,77**
17	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	220.059.250	220.059.250	217.626.318	*98,89*	98,89
18	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	85.383.712	85.383.712	84.067.698	*98,46*	98,46
JUMLAH		**67.737.322.555**	**64.287.311.994**	**60.500.873.666**	***94,11***	**94,31**

Sumber : Laporan LPPK DTPH-Nak Provinsi Jambi Tahun 2022

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada Tahun 2022 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang di prioritaskan sesuai tujuan yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja 2022 (LKJ) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022, dengan tujuan menyampaikan sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan maksud untuk evaluasi ke dalam sebagai instansi pemerintah.

Cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan dengan hal tesebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun komitmen para pelaksana kegiatan agar bekerja lebih baik dan bertanggungjawab melalui kinerja yang berkualitas tinggi.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai tujuan strategis dan sasaran strategis yang kemudian dituangkan kedalam pelaksanaan 7 program APBD.

Adapun capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi baik berdasarkan capaian kinerja kumulatif sasaran maupun kumulatif tujuan, mampu mencapai besaran serapan diatas 90 % baik APBD ataupun APBN. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas walaupun dalam kondisi masih pandemi Covid 19 dan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan anggaran misalnya. Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan SAKIP di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah masih kurangnya ketertiban unit kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja, misalnya belum tepatnya perumusan dari jabaran kelengkapan dari instrument SAKIP. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, terutama peningkatan pemahaman aparatur di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan disertai sumber daya manusia yang berkapabilitas tinggi.

4.2. Saran-Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas segera diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran mulai dari staf sampai kepada pejabat atas akan pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil dan tepat guna;
2. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;
3. Kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah perlu disinkronisasikan dan diharmonisasi agar terciptanya kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah.

Lampiran –Lampiran